

**PEMBIAYAAN BERBASIS *FINTECH* MELALUI APLIKASI SHOPEE
PAYLATER PERSPEKTIF FATWA MUI JATIM NOMOR 4 TAHUN 2022**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Imaddudin

NIM. 05010222015



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Imaddudin
NIM : 05010222015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Pembiayaan Berbasis Fintech Melalui Aplikasi Shopee Paylater
Perspektif Fatwa MUI Jatim No 4 Tahun 2022

- Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 04 April 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Imaddudin

NIM. 05010222015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Imaddudin

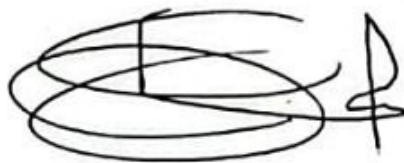
NIM : 05010222015

Judul : Pembiayaan Berbasis *Fintech* Melalui Aplikasi Shopee Paylater Perspektif Fatwa MUI Jatim No 4 Tahun 2022

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 08 April 2026

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.

NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Imaddudin

NIM. : 05010222015

Judul : Pembiayaan Berbasis Fintech Melalui Aplikasi Shopee Paylater
Menurut Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

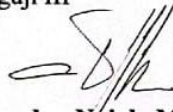
Penguji I



Dr.H.Mohammad Arif, Lc.,MA

NIP. 197001182002121001

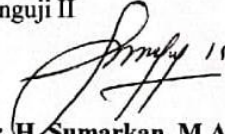
Penguji III



Ahmadun Najah, M.H.I.

NIP. 197709152005011004

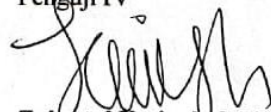
Penguji II



Dr. H. Sumarkan, M.Ag.

NIP. 196408101993031002

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 07 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Imaddudin
NIM : 05010222015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : imadzaksholeh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pembiayaan Berbasis Fintech Melalui Aplikasi Shopee Paylater Menurut Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis

(Muhammad Imaddudin)

ABSTRAK

Pesatnya penggunaan Shopee PayLater belum diimbangi pemahaman mendalam tentang mekanisme akad, biaya tersembunyi, dan potensi pelanggaran syariah seperti riba. Identifikasi masalah mencakup kerumitan struktur pembayaran, kurangnya kepastian hukum regulasi fintech, serta risiko sengketa bagi nasabah Muslim akibat ketidaksesuaian dengan Fatwa MUI Jatim No. 04/2022.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan jenis data primer yang diperoleh melalui wawancara. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur, kemudian diolah secara sistematis melalui transkripsi, penyuntingan, serta pengkategorian bahan hukum. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif dan deskriptif-analitis untuk menelaah kesesuaian Sistem pembiayaan Shopee PayLater dalam transaksi pembelian barang dengan norma hukum syariah yang ditetapkan dalam kedua fatwa di atas.

Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pembayaran pembelian barang menggunakan fitur Shopee Paylater belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama karena adanya biaya cicilan yang berbasis persentase dan bergantung pada tenor, sehingga berpotensi mengandung unsur riba, serta denda keterlambatan 5% yang berlaku otomatis tanpa membedakan antara debitur yang sengaja menunda dan yang benar-benar kesulitan. Meskipun biaya layanan dapat dipahami sebagai *Ujrah* (imbalan jasa) jika transparan dan riil, praktik saat ini sulit dilepaskan dari tambahan yang terkait waktu penangguhan pembayaran, yang bertentangan dengan Fatwa MUI Jatim No. 4 Tahun 2022. yang menegaskan larangan riba, gharār, tadhā, dharar, dan zhulm dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

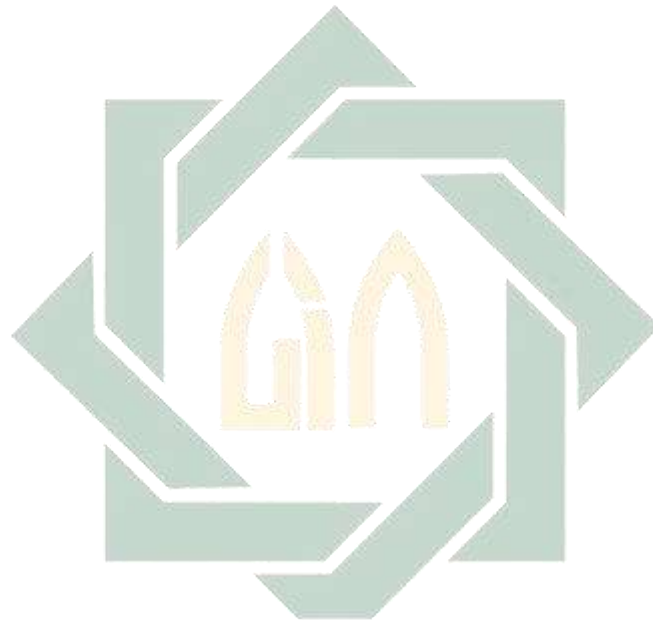
Pihak penyedia layanan diharapkan dapat melakukan penyesuaian Sistem biaya dengan menetapkan *Ujrah* (biaya jasa) yang bersifat tetap (*flat*) di awal, tanpa didasarkan pada persentase tenor agar terhindar dari unsur riba. Bagi masyarakat khususnya nasabah Muslim, diharapkan lebih cermat dan literat dalam memahami akad-akad pada layanan *fintech* sebelum bertransaksi. Pemerintah dan otoritas terkait (OJK dan DSN-MUI) perlu memperketat pengawasan serta standarisasi terhadap produk *paylater*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah & Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori.....	19
H. Definisi Operasional.....	21
I. Metode Penelitian.....	22
J. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KONSEP PEMBIAYAAN SYARIAH DAN FATWA DSN MUI JATIM NO 4 TAHUN 2022.....	32
A. Konsep Pembiayaan dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	32
1. Konsep Pembiayaan.....	32
2. Tujuan Pembiayaan.....	34
3. Jenis Pembiayaan Syariah.....	35
B. Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah.....	36
1. Keabsahan Akad dalam Hukum Islam.....	36
2. Transparasi dan Keterbukaan.....	36
3. Prinsip Keadilan.....	37
4. Prinsip Riba.....	37
C. Akad Pembiayaan dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	38

a) Wakālah bil <i>Ujrah</i>	38
b) Akad Qard.....	41
c) Akad Ijārah (Ujrah/Fee).....	45
d) Akad Murābaḥāṭu.....	49
D. Konsep Financial Teknologi.....	52
1) Financial Tecnology:.....	52
BAB III PEMBIAYAAN APLIKASI SHOPEE PAYLATER.....	70
TERHADAP PEMBELIAN BARANG.....	70
A. Pengertian dan Karakteristik Shopee PayLater.....	70
1. Definisi Shopee Paylater.....	70
2. Kedudukan Shopee Paylater sebagai Produk <i>Fintech</i> Pembiayaan.....	72
3. Pembiayaan <i>Fintech</i> Aplikasi Shopee PayLater.....	73
B. Sistem Pembelian Barang melalui Transaksi Shopee Paylater.....	75
a) Alur dalam pembelian barang melalui platform Shopee menggunakan Shopee Paylater diantaranya:.....	76
b) Alur Penagihan dan Pembayaran Cicilan.....	76
c) contoh Praktik pembiayaan dalam pembelian Barang.....	77
C. Fatwa Majelis Ulama'Indonesia Jawa Timur No 4 Tahun 2022.....	82
BAB IV ANALISIS PEMBAYARAN <i>FINTECH</i> SHOPEE PAYLATER TERHADAP PEMBELIAN BARANG MENURUT FATWA MUI JATIM NOMOR 4 TAHUN 2022.....	84
A. Analisis Sistem Pembayaran <i>Fintech</i> Shopee Paylater.....	84
1. Sistem Pembiayaan Shopee Paylater dalam Pembelian Barang.....	84
2. Kedudukan Para pihak dalam sistem Pembayaran Shopee Paylater.....	85
3. Struktur Pembayaran dan Komponen Biaya Shopee Paylater.....	86
4. Risiko dan Konsekuensi Pembayaran Shope Paylater.....	87
B. Analisis Kesesuaian Shopee Paylater Menurut Fatwa MUI Jatim No 4 tahun 2022.....	89
1. Analisis Prinsip Dasar Syariah dalam Skema Shopee PayLater: Uji Riba,gharār/Tadlīs, dan Dzulm.....	89
2. Analisis Struktur Biaya Layanan Shopee PayLater dalam Perspektif Konsep Ujrah dan Larangan Riba.....	96
3. Analisis Denda Keterlambatan Shopee Paylater Perpektif Ta'zīr, Ta'wid dan Prinsip Keadilan (KHES).....	98
4. Kaidah Fikh Muamalah sebagai kerangka kerja analisis Shopee Paylater.....	103

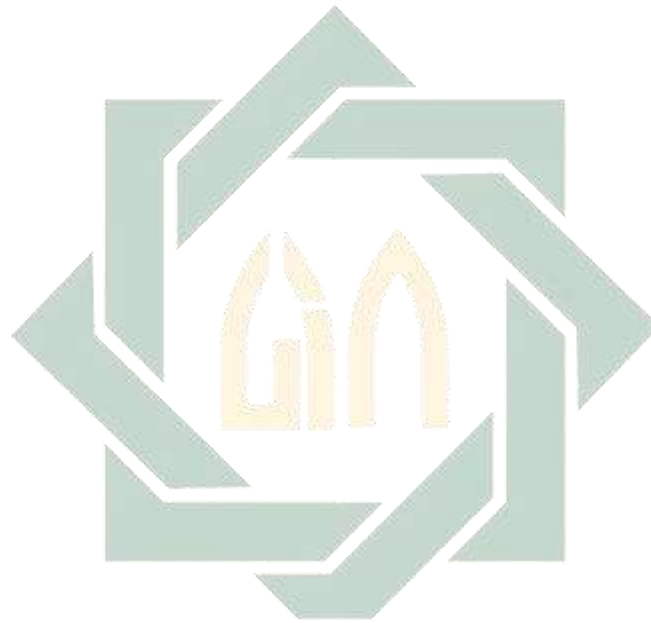
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	117
Data Gambar Hasil Wawancara Nasabah Pembiayaan.....	128
BIOGRAFI PENULIS	129



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. pengemasan barang	78
Gambar 2 Pembayaran Shopee Paylater	78
Gambar 3. Perjanjian Kerja sama	79
Gambar 4. Selesai Transaksi.....	80
Gambar 5. Pembelian barang	80
Gambar 6. Pembayaran Skema Cicilan Paylater.....	81
Gambar 7 Skema cicilan Shopee paylater.....	94
Gambar 10. wawancara dengan penerima pembiayaan	128
Gambar 8. wawancara dengan penerima pembiaayaan	128
Gambar 9. wawancara penerima pembiaayaan.....	128



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Logung Pustaka, 2009.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. 1 vol. Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Hamdan Firmansyah, et al., Sri Nawatmi, Roby Aulia Zamora, et al. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Insania, 2021.
- Yuliani, Weni, "Fiqh Muamalah." *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang Pariaman), Mei 2025.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Alwi, Achmad Basori. "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018): 255–71. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-271>.
- Anggraini, Sania Puspita, dan Hardian Iskandar. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater." *Pleno Jure* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37541/plenjure.v11i1.701>.
- Ardiana, Zendy Sellyfio. "Akad Wakālah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang." *Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2 (2022): 737–41. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15>.
- Barata, Amrin. "Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Pemerataan Pendapatan Melalui Ekonomi Digital Syariah Di Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 1 (2019): 145–68. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1053>.
- Barata, Amrin. "Strengthening National Economic Growth And Equitable Income Through Sharia Digital Economy In Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 1 (2019): 145–68. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1053>.

- Basyirah, Luthfiana. "Implementation of Qawa'id Fiqhiyyah Mu'amalah on Al-Qarḍu Al-Hasan Products in Sharia Banking." *Justisia Ekonomika* Vol 5, no. 2 (2021): 285–99. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qarḍ Sebagai Akad Tabarru'." *Yuridika* 28, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>.
- Alwi, Achmad Basori. "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018): 255–71. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-271>.
- Hamdan Firmansyah, et.al., Sri Nawatmi, Roby Aulia Zamora, et.al, *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. INSANIA, 2021. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/>. "Akad Syariah: Pengertian, Prinsip, Jenis dan Manfaatnya." 4 Desember 2025.
- Ilvi Hasanah dan Jamil Rifani. "Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Kalangan Mahasiswa Stia Amuntai." *2025-10-28* 2, no. 1 (2025): 133. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JAB/article/view/1572>.
- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori, dan Aneng Anisa Daliah Mutiara. "Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 nomor 5 (Mei 2024): Page 164-170. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.451>.
- Juliani Wulandari, Bunga Aura Putri Sulistyono, David Maulana Verdiansyah, Wisanggeni Wahyu Lintang B.S, dan Renny Oktafia. "Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 2, no. 2 (2024): 165–71. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687>.

- Kusuma, Hendra, dan Wiwiek Kusumaning Asmoro. “Perkembangan Financial Teknologi (fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>.
- Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. 1 vol. Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Qatrunnada, Nadia, dan Indra Marzuki. “Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (fintech).” *al-Mizan* 3, no. No 2 (2019): 1–130.
- Rahayu, Alfina Putri. “Analisis Praktik Shopee Paylater dalam Perspektif Pemikiran Zaid bin Ali.” *Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta* 10, no. 1 (2025).
- Siti Dewi Masithoh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, 68. t.t., 64–68.*
- Sonnia, Sonia. “Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi.” *Lex LATA* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1461>.
- Utami, Metta Ria, Meriyati Meriyati, dan Havis Aravik. “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Serta Pandangan Perspektif Ekonomi Islam Terhadapnya.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 269–82. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.235>.
- Setiyowati, Arin, dan Ainol Yaqin Sm. “Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3396. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>
- Wardani, Aliya Kusuma, Amanda Nur Baetillah, Ghumayda Milhan, Aris Fadillah, Nurhaliza Fauziah Iriyanti, dan Asep Rudi Nurjaman. *Analisis Penggunaan Shopee Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Permasalahan Generasi Muda*. 3, No. 2 (T.T.).

Wijayanti, Nisa Henri, Puji Sulistyarningsih, dan Dakum Dakum. “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater.” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 2 (2023): 56–69. <https://doi.org/10.31603/10026>.

Yufan, Bella Permata. “Penggunaan Shopee PayLater Perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa MUI Jawa Timur No.4 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater.” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto), 2025.

Yuliani, Weni, dan “Fiqh Muamalah.” *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang Pariaman), Mei 2025.

Peraturan perundang-undangan

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahāñu*. Majelis Ulama Indonesia, 2000.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa Nomor 117/DSN- MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: DSN-MUI.) (2018). Ditetapkan oleh DSN-MUI pada Februari 2018.

(Peraturan BI No 20/6/PBI/2018), E-Money Adalah Alat Pembayaran Yang Dapat Digunakan Sebagai Pengganti Uang Tunai Dalam Transaksi Pembayaran. Diakses 2 Februari 2026. <https://www.bi.go.id/licensing/helps/PBI-200618%20UE.pdf>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 1 (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (2022).

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/Dsn-MUI/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (2000). <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/multifinance/17-sanksi-atas-nasabah-mampu-yang-menunda-nunda-pembayaran.pdf>.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/Dsn-MUI/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (2000). Ditetapkan oleh DSN-MUI 16 September.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/Dsn-MUI/Viii/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh) (2004). https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/45.pdf

Fatwa DSN -MUI Nomer NO:116/Dsn MUI/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (2017). Ditetapkan Oleh DSN-MUI 19 September.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. (2022). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*. Surabaya: MUI Jawa Timur. Diakses dari <https://MUIjatim.or.id>.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (2000). <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/multifinance/17-sanksi-atas-nasabah-mampu-yang-menunda-nunda-pembayaran.pdf>.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (2000). Ditetapkan Oleh DSN-MUI 16 September.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh) (2004). https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/45.pdf.

Fatwa DSN -MUI Nomer No:116/Dsnmui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (2017). Ditetapkan oleh DSN-MUI 19 September.

(Peraturan BI No 20/6/PBI/2018), E-Money Adalah Alat Pembayaran Yang Dapat Digunakan Sebagai Pengganti Uang Tunai Dalam Transaksi Pembayaran. Diakses 2 Februari 2026. <https://www.bi.go.id/licensing/helps/PBI-200618%20UE.pdf>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (2022).

Majalah, Koran, dan Surat Kabar

Muhammad Hanif Rahman. “Hukum Transaksi PayLater yang Bebas Denda, Bolehkah?” Nu Online. Diakses 19 Januari 2026. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-transaksi-paylater-yang-bebas-deda-bolehkah-71>

Rani Sulistianti. “5 Bahaya Telat Bayar Shopee PayLater yang Bikin Denda Mencekik Napas!” <https://www.inilah.com/>. 15 Oktober 2025. <https://www.inilah.com/bahaya-telat-bayar-shopee-paylater>.

Data Elektronik

“Riyad as-Salihin 1611 - The Book of the Prohibited actions - عنها كتاب الأمور المنهي - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (ﷺ).” Diakses 19 Januari 2026. <https://sunnah.com/riyadussalihin:1611>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 18 Januari 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=200&to=275>.

Muhammad Hanif Rahman. “Hukum Transaksi PayLater yang Bebas Denda, Bolehkah?” Nu Online. Diakses 19 Januari 2026. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-transaksi-paylater-yang-bebas-denda-bolehkah-71Dpz>.

Muhammad Syamsudin. “*Fintech dalam Pandangan Hukum Islam*” 30 Mei 2020. <https://bincangsyariah.com/kolom/fintech-dalam-pandangan-hukum-islam/>.

“MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia.” MUI.Digital. 2024. <https://MUI.or.id/baca/berita/apa-hukum-pinjol-menurut-islam-begini-penjelasan-fatwa-MUI?>

“Hadis: Penundaan (pembayaran Hutang Oleh) Orang Yang Mampu Adalah Kezaliman. Jika Seseorang Dari Kalian Dialihkan Hutangnya Kepada Orang Kaya Maka Hendaklah Dia Menerimanya! - Ensiklopedia Terjemahan Hadis-Hadis Nabi.” HadeethEnc.com. Diakses 18 Januari 2026. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/6141>.

“Hadith 32, 40 Hadith an-Nawawi - Forty Hadith of an-Nawawi - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم).” Diakses 19 Januari 2026.

<https://sunnah.com/nawawi40:32>.

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/>. “Akad Syariah: Pengertian, Prinsip, Jenis dan Manfaatnya.” 4 Desember 2025.

Santri Nderek Kyai. (2024). *Kajian Gus Ali Zainal Muhammad di Masjid Kampus Mardliyyah Islamic Center UGM*. Instagram. Diakses dari <https://instagram.com/santri.nderekkyai>.

Wawancara

Andi. “Nasabah Pembiayaan.” (Surabaya), Wawancara, 25 Januari 2026.

Nailah Najihah. “Mahasiswi Pengguna Shopee Paylater.” (Surabaya), Wawancara, 9 Januari 2026

Luqmanul Hakim. “Mahasiswa PENS (nasabah Pembiayaan).” (Surabaya), Wawancara, 27 Januari 2026.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A